

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan memiliki tanggung jawab diantaranya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Susila Wati, (2022) mengatakan bahwa pemenuhan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat. Yang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah ialah tentang pengentasan kemiskinan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial, Kementerian sosial memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data fakir miskin di lingkup nasional, tugas dinas sosial Provinsi sebagai pengelolaan data fakir miskin di lingkup Provinsi, sedangkan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup kabupaten/kota dengan melakukan pemutakhiran DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan dan real sesuai lapangan.

Pada tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu, Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Kemensos nomor 5 Tahun 2019. Pada pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan data merupakan kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan dan pemeliharaan data, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan ketepatan dan akuntabilitas data penggunaannya untuk

bahan bantuan sosial. Sehingga data terpadu kesejahteraan sosial dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya untuk penerimaan bantuan sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tindakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Upaya Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasi pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, diantaranya Pemerintah telah melakukan beberapa program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial untuk keluarga tidak mampu yang telah memenuhi syarat yang ada. Pendataan keluarga tidak mampu juga sudah diatur melalui Kementrian/ Lembaga terkait. Dalam hal ini melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Susila Wati, 2022).

Menurut Amalia Yunia Rahmawati, (2020) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang terletak dipulau Sumatera dengan peringkat 11 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan yang relatif besar. Kemiskinan sering kali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Di Provinsi Lampung terdapat 15 Kabupaten yang masing-masing kabupaten tersebut memiliki presentase kemiskinan yang berbeda. Berikut merupakan tabel presentase kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung

Tabel 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung (persen)

No	Wilayah	2020	2021	2022
1.	Lampung Barat	12,52	12,82	11,71
2.	Tanggamus	11,68	11,81	10,98
3.	Lampung Selatan	14,08	14,19	13,14
4.	Lampung Timur	14,62	15,08	13,98
5.	LampungTengah	11,82	11,99	10,96
6.	Lampung Utara	19,30	19,63	18,41
7.	Way Kanan	12,90	13,09	11,76

8.	Tulang Bawang	9,33	9,67	8,42
9.	Pesawaran	14,76	15,11	13,85
10.	Pringsewu	9,97	10,11	9,34
11.	Mesuji	7,33	7,54	6,84
12.	Tulang Bawang Barat	7,39	8,32	7,44
13.	Pesisir Barat	14,29	14,81	13,84
14.	Bandar Lampung	8,81	9,11	8,21
15.	Metro	8,47	8,93	7,87

Sumber:Badan Pusat Statistik (Provinsi Lampung,2023)

Berdasarkan tabel 1.1 yang sudah dipaparkan diatas diketahui bahwa presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami laju penurunan yang signifikan, dilihat dari tahun 2020-2022 jumlah penduduk miskin yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara mencapai 18,41 persen, sedangkan Kabupaten Lampung Timur berada pada urutan kedua mencapai 13,98 persen dan yang terendah kabupaten Mesuji mencapai 6,84 persen. Menurut (Fitri Oktavia., 2020) Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya kemiskinan di Lampung Timur di dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yaitu dengan adanya keterbelakangan dan ketinggalan sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari rendahnya indeks pembangunan manusia, kurangnya modal dan rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh laju pertumbuhan ekonomi).

Menurut (Iyos Rosyid, 2023) mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program PKH memberikan bantuan dana kepada Rumah Tenaga Sangat Miskin (RTSM) atau sekarang diubah istilahnya menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2007.

Upaya Pemerintah dalam mempermudah proses validasi data dengan adanya bantuan Aplikasi SIKS-NG yang merupakan aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan berbasis data terpadu masyarakat miskin. Aplikasi SIKS-NG mulai diperkenalkan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020, sosialisasi ini dilakukan oleh setiap pendamping Kecamatan yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Dengan setiap desa terdapat satu sebagai operator desa yang bertugas sebagai pengimput data masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan kurang mampu. Setelah data tersebut dimasukkan kedalam aplikasi SIKS-NG kemudian data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur yang berwenang untuk verifikasi dan validasi data tersebut. Aplikasi SIKS-NG merupakan salah satu aplikasi yang dapat merubah dan mengusulkan warga kedalam DTKS maupun kepesertaan program Bantuan Sosial (Bansos).

Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup terkecil yaitu Desa/Kalurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial salah satunya yaitu PKH tepat sasaran. Akan tetapi di kabupaten lampung timur ini masih terdapat beberapa fenomena yaitu yang pertama, kurang tepatnya penerima bantuan sosial. Adapun tidak ketepatannya penerimaan bantuan ini dikarenakan terdapat kesalahan atau perbedaan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti, NIK, nama, serta Alamat penerima bantuan. Serta fenomena kedua, yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada operator desa, sehingga masih kurang efektif dalam menjalankan Aplikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial berbasis aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Dengan mengingat pentingnya pengelolaan data DTKS untuk menghasilkan data yang berkualitas, yang valid dan aktual sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Maka dalam penelitian ini mengangkat judul **“Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi fokus atau permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur?”.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu: “Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur”.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial berbasis Aplikasi SIKS-NG didalam pemerintah tingkat Kabupaten dan Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lainya terkait dengan tema pada penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberi tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai penerapan aplikasi SIKS-NG untuk pengelolaan data penerimaan bantuan dan Sebagai pengetahuan yang baru dan menambah wawasan bagi penulis serta dapat diterapkan oleh penulis mengenai pengelolaan data penerimaan bantuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 2 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Haromin, 2022)	Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sositem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SKIS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.	diketahui bahwa program SIKS-NG secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong menengah kebawah dikarenakan kehadiran dari program ini bermuara pada penyaluran bantuan. Dari segi SDM sudah cukup efektif karena Operator SIKS-NG faham dalam mengoperasikan komputer dan faham tentang aplikasi SIKS-NG. Tetapi dari segi sarana dan prasaran dirasa masih belum maksimal karena masih kurangnya perhatian dari desa. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SIKS-NG dari segi penyalurannya menyesuaikan dengan data yang ada yang berisi masyarakat tergolong kurang mampu sehingga bantuan itu
2.	(Susila Wati, 2022)	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTS) Dalam Penyaluran Bantuan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memudahkan dan mempercepat proses pemutakhiran data, upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pemutakhiran data perlu dilakukan penambahan staf bagian pengelola data DTKS serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data yang

			dihasilkan lebih berkualitas yaitu data masyarakat yang akurat, sinkron dan lengkap.
3.	(Asrandi T et al., 2022)	Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) Dalam Mendukung Program SLRT Dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan menerapkan lima aspek layanan, seperti one stop service, kemitraan, program mekanisme layanan, manajemen kasus, dan informasi dan intervensi sistem.
4.	(Gaghauna et al., 2022)	Optimasi SIKS-NG Di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana serta keleluasaan ruang kerja dan jumlah sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai sehingga, perlu dioptimalkan agar penggunaan aplikasi SIKS-NG dapat berjalan dengan optimal
5.	(Wati et al., 2022)	Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM.	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas sistem informasi SIKSNG pada kelurahan gunung seteleng apakah penggunaan sistem informasi sudah berjalan dengan efektif atau belum.
6.	(Ledoh, 2023)	Analisis Resiko Operasional Verifikasi Dan Validasi Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Penerima Bantuan Sosial.	Dalam pelaksanaan bantuan sosial masih terdapat persoalan, masih ditemukan orang mampu menerima bansos sedangkan orang miskin dan tidak mampu tidak terdaftar bahkan tidak mendapat bansos. Permasalahan verifikasi dan validasi data didaerah antara lain SDM dan daya tanggap pelaksana data yang kurang responsif, persoalan akurasi data dan pemuatkhiran data seperti nama dan NIK tidak padan dukcapil karena tidak diperbaharui, transparansi data, operator tidak efektif melakukan perbaikan data, jaringan internet yang tidak memadai, pergantian operator, pemekaran wilayah baru, tidak adanya anggaran dan kurangnya tatakelola aplikasi dengan baik
7.	(Akbar et al., 2023)	<i>Implementation Of Social Welfare (DTKS) Integrated Data Program Through</i>	Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa hanya indikator sumber daya dinilai belum maksimal terlihat dari

		<i>The Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG).</i>	penggunaan aplikasi sistem kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) yang sering mengalami gangguan atau kesalahan pada saat penginputan data dan ketidakstabilan sistem jaringan di wilayah pedesaan Huntu, Khususnya di Kantor Desa Hunter.
8.	(Widya & Sari, 2021)	<i>Design An Application Programming Interface For A Population Social Welfare Survey Application In The Context Of System Integration.</i>	Hasil Penelitian dalam rangka mewujudkan program kesejahteraan penduduk pemerintah desa sumbermulyo kabupaten Jombang provinsi jawa timur ini dengan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai kasus kemiskinan yang terjadi pada Masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengajukan bantuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Proses pengajuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilakukan mulai dari pendataan Masyarakat miskin oleh petugas dengan mendatangi Masyarakat miskin untuk melakukan validasi data menggunakan aplikasi android.
9.	(Tamrin, 2019)	<i>Capacity Building Of Apparatus For Reducing Poverty.</i>	hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator kualitas berdasarkan pemutakhiran sebagai basis data terpadu tahun 2015. Dari kondisi angka kemiskinan ditemukan dua mekanisme pendataan melalui DAMIS Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Pengawasan Sosial (BAPPEDA) dan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSNG) dari Dinas Sosial. Hal ini menciptakan dua sumber data yang berbeda. Pembentukan tim koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan (TKP2DES), aparatur departemen sosial desa.
10.	(Setiawan et al., 2021)	<i>The Village Integrated Social Services Through The Social Welfare Center In Indonesia.</i>	Kajian ini mengungkap pelayanan sosial terpadu bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat desa melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. Di Indonesia disebut Puskesmas yang merupakan tempat pelaksanaan kegiatan sosial terpadu antar

			kelompok masyarakat di desa dalam skema Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Puskesmas bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas dapat mempercepat layanan sosial dalam membantu warga mengidentifikasi kebutuhannya dan dapat memberikan layanan dengan program sosial yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Mereka juga dapat dengan cepat menyelesaikan pengaduan terhadap program sosial yang mereka terima dan memastikan pengaduan mereka tertangani dengan baik. Puskesmas dapat mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat di desa sehingga tidak perlu menempuh jarak yang jauh hingga ke tingkat kabupaten. Warga hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengakses berbagai program sosial yang komprehensif.
11.	(Musaddad & Kriswibowo, 2021)	<i>Optimalizing Big Data In Reducing Miss-Targeting Family Hope Program (PKH) In Sidoarjo District With Approach Machine Learning.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil Big Data PKH oleh SIKS-NG dan machine learning berdasarkan data dan indikator pengukuran kemiskinan yang sama. Diperoleh model algoritma Averaged Neural Network dengan hasil yang optimal dibandingkan algoritma-algoritma lain. Adapun hasil pengujian data yang diperoleh pada SIKS-NG dan Machine Learning yang menggunakan evaluasi konfusi matriks.
12.	(Pohan & Salisah, 2021)	<i>Usability Analysis Of Social Welfare Information System Next Generation Using Mecall Method In Langkat District Sosial Service.</i>	Penerapan SIKS-NG tidak hanya dilakukan di lingkungan dinas sosial saja namun juga diterapkan di lingkungan desa dan kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi SIKS-NG berbasis offline untuk mengetahui

			tingkat kepuasan pengguna aplikasi SIKS-NG.
13.	(Hou et al., 2020)	<i>Applying Big Data Analysis To Discuss The Elderly Social Welfare Service Use Condition And The Relevant Factors.</i>	Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan diharapkan dapat memahami secara komprehensif kondisi pemanfaatan layanan kesejahteraan lansia dan mengidentifikasi faktor-faktor pemanfaatan layanan lansia sehingga dapat mengkaji kesesuaian layanan kesejahteraan lansia dengan kebutuhan lansia untuk mengembangkan fungsi pelayanan lansia secara maksimal. layanan kesejahteraan sosial.
14.	(Wijoyono, 2021)	<i>The Utilization Of Village Information System For Integrated Social Welfare Data Management: Actor-Network Theory Approach In Gunung Kidul Regency.</i>	Integrasi ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data. Penguatan partisipasi dan transparansi interaksi sosial antara instansi pemerintah di setiap tingkat (dari tingkat desa hingga nasional) dan masyarakat merupakan hal yang penting karena masyarakatlah yang menjadi penerima manfaat. Proses-proses ini akan mengembangkan skema reflektif, untuk memastikan kualitas perencanaan dan program pembangunan pengentasan kemiskinan berjalan dengan data yang akurat dan valid.
15	(Kardeti, 2021)	<i>The Integrated Social Protection For The Poor In An Auotonomous Regency of West Java Indonesia.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial terpadu dilakukan dengan menerapkan lima aspek pelayanan, seperti pelayanan terpadu satu pintu, kemitraan, program mekanisme pelayanan, manajemen kasus, dan intervensi sistem informasi. Melalui sistem ini pemerintah Kabupaten Bandung berupaya untuk dapat memberikan perlindungan sosial terpadu kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan sosial terpadu bagi masyarakat miskin di

			Kabupaten Bandung, Jawa Barat melalui SLRT dan Puskesmas.
--	--	--	-----------------------------------------------------------

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang menganalisis terkait dengan tema yang diteliti pada penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti ingin menguraikan dua jurnal yang terkait dengan tema yang diteliti yaitu

- a. Menurut (Asrandi T et al., 2022) dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dalam Mendukung Program SLRT Dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan menerapkan lima aspek layanan seperti *onestop service*, kementerian program mekanisme layanan, manajemen kasus dan informasi dari interfensi sistem.
 - 1) Persamaan: Sama-sama meneliti tentang program sistem informasi kesejahteraan sosial, dan sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
 - 2) Perbedaan: fokus pada penelitian terdahulu meneliti tentang efektivitas program sistem informasi kesejahteraan sosial dalam mendukung program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.
- b. Menurut (Wati et al., 2022) dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*(SIKS-NG) di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM”. Hasil dari penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengukur efektivitas SIKS-NG pada Kelurahan Gunung Seteleng apakah penggunaan sistem informasi sudah berjalan dengan efektif atau belum.

- 1) Persamaan: Sama-sama meneliti tentang program sistem informasi kesejahteraan sosial, dan sama sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
- 2) Perbedaan: fokus penelitian terdahulu untuk mengukur efektivitas SIKS-NG Pada Kelurahan Gunung Seteleng apakah penggunaan sistem informasi sudah berjalan dengan efektif atau belum. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Dari perbedaan dan persamaan yang sudah dipaparkan diatas merupakan penelitian yang membahas terkait data dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG. Dimana data kesejahteraan berbasis aplikasi sistem informasi tersebut memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Beberapa peneliti terdahulu juga menyimpulkan bahwa adanya aplikasi SIKS-NG dapat memberikan beberapa dampak, baik dampak positif maupun negative dari pengelolaan aplikasi ini. Dari hasil Penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dan aplikasi sistem informasi tersebut sangat berperan penting dalam membantu pembangunan kesejahteraan sosial serta membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di negara Indonesia.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Data Driven In Government

Menurut (Luthfi & Janssen, 2019). menyatakan bahwa pemerintah secara aktif mendorong keterbukaan data untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan ini berbasis bukti yaitu situasi dimana keputusan yang diambil didasarkan pada data faktual.

Teori *Driven In Government* yang merujuk pada pemerintahan yang digerakan oleh misi atau tujuan tertentu.

Menurut (Matheus et al., 2020). menyatakan bahwa Instansi Pemerintah kini semakin berorientasi pada data dan membutuhkan data berkualitas tinggi untuk menjalankan perannya di masyarakat. Oleh karena itu, data *driven* ini dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang didasarkan data aktual atau hasil pengamatan dan kebijakan atau untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut (Ubaldi & Welby, 2019). Menyatakan bahwa data *driven* yang dapat dipandang sebagai aset strategis dimana data driven ini berperan penting dalam penyelenggaraan, kinerja Pemerintah dan bagi negara-negara untuk mengembangkan pendekatan menyeluruh yang mengutamakan nilai data. Tujuannya, untuk mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat. Yang mana dimaksud diatas data *driven* sebagai aset strategis karena data tersebut menjadi pendekatan penting dalam bergerak menuju *e-government* cerdas yang berpusat pada warga negara.

Menurut (Agbozo, 2018). Menyatakan bahwa data *driven* ini juga dapat digunakan untuk membantu peningkatan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi lingkungan kita, dan meningkatkan penghidupan yang sejahtera untuk hari ini dan masa depan. Hal ini sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan data *driven* yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yang salah satunya dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang ditargetkan memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu data *driven* ini juga menjadi konsep *e-government* yang

bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah dalam pembangunan.

Menurut (Clay G. Weslatt,2007) teori *driven government* dalam *website e-Government* mengatakan bahwa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Pada hal ini data *driven* ini juga dapat digunakan untuk membantu peningkatan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi lingkungan kita, dan meningkatkan penghidupan yang sejahtera untuk hari ini dan masa depan.

Menurut (Clay G. Weslatt,2007) terdapat 3 variabel yaitu kualitas data, kecanggihan alat, dan kemampuan analisis. Dalam penelitian ini terdapat variabel dengan menggunakan indikator selanjutnya menghasilkan parameter yang digunakan untuk mengukur apa saja yang akan dioperasionalkan pada saat terjun lapangan. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu:

1. Kualitas data dengan indikator pengelolaan data, serta dengan parameter perencanaan pengelolaan DTKS, pengambilan informasi dan pengamatan.
2. Kecanggihan alat dengan indikator pengelolaan aplikasi, serta dengan parameter kualitas SDM, Faktor pendukung dan faktor penghambat.
3. Kemampuan analisis dengan indikator evaluasi, serta dengan parameter pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas dan dampak keberhasilan.

1.6.2 Pengelolaan Data

Menurut (Arianta, 2017) pengelolaan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang

bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Pengelolaan data juga merupakan segala macam pengelolaan data atau kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengelolaan data untuk membuat data tersebut berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera digunakan.

Pengelolaan data sangat penting di era digital ini karena jumlah data yang dihasilkan makin banyak dan kompleks. Data yang dihasilkan dari berbagai sumber memerlukan pemrosesan yang tepat dan akurat agar dapat digunakan. Pengelolaan data yang dilakukan dengan tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif.

Pengelolaan data merupakan proses mengumpulkan, memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pengelolaan data menurut (Cloudeka Lin, 2022) meliputi:

- 1. Pengumpulan Data:** langkah pertama dalam pengelolaan data yaitu pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, kuesioner, basis data dan media sosial. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat dan relevan untuk tujuan pengelolaan data.
- 2. Pembersihan Data:** selanjutnya pembersihan data, data dapat memiliki kesalahan atau duplikasi dan hal ini dapat memengaruhi hasil akhir dari pengelolaan data.
- 3. Pengelolaan Data :** dalam tahap ini, data diubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan dapat dianalisis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah data menjadi tabel, grafik atau diagram.

4. Analisis Data: dalam tahapan ini, data dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Analisis data dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tren, pola dan hubungan antara data yang berbeda.

5. Interpretasi Data: hasil analisis data kemudian akan diinterpretasi untuk menghasilkan insight dan informasi yang lebih berguna. Interpretasi data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif.

6. Presentasi Data: langkah terakhir dalam pengelolaan data yaitu presentasi data. Dalam tahap ini, hasil pengelolaan data dipresentasikan dengan cara yang mudah dimengerti dan menarik. Presentasi dapat dilakukan dengan cara membuat laporan, grafik atau presentasi visual.

1.6.3 Program Keluarga Harapan Melalui Aplikasi SIKS-NG

Menurut (Ika Lailatul Rohmah, 2023) mengatakan bahwa aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan Pemerintah. yang bertujuan untuk dapat merubah dan mengusulkan warga kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun kepesertaan program Bantuan Sosial (Bansos). Pada penelitian memfokuskan pada salah satu bantuan yang terdapat pada Aplikasi SIKS-NG yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut (Fabiana Meijon Fadul, 2019) mengatakan bahwa PKH merupakan program yang memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Pendidikan dan Kesehatan. PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Data Driven In Government

Teori *driven government* menekankan pada pengolahan data oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang aktual dan valid. Teori ini juga dapat digunakan Pemerintah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan atau untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada masyarakat. Sesuai dengan fokus pada penelitian ini yang akan membahas tentang bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SKIS-NG terhadap keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

1.7.2 Pengelolaan Data

Pengelolaan data sangat penting di era digital ini karena jumlah data yang dihasilkan makin banyak serta kompleks. Pengelolaan data juga merupakan proses mengumpulkan, memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Dengan demikian menurut (Cloudeka Lin, 2022) pengelolaan data meliputi yaitu pengumpulan data, pembersih data, pengelolaan data, analisis data, inteprestasi data, presentasi data. Pengelolaan data dilakukan dengan tepat sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Dalam hal ini Sesuai dengan penelitian ini yang berfokus pada bagaimana pengelolaan DtkS melalui aplikasi SIKS-NG dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Lampung Timur

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

No	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Data <i>Driven Government</i> (Data PKH)	1. Kualitas Data	Pengelolaan data	a. Pengelolaan DTKS melalui Aplikasi SIKS-NG b. Pengambilan Informasi dan Pengamatan
		2. Kecanggihan alat	Penggunaan aplikasi	a. Kualitas SDM b. Faktor Pendukung c. Faktor penghambat
		3. Kemampuan analisis	Evaluasi	a. Peningkatan akuntabilitas b. Evaluasi penggunaan Aplikasi c. Dampak keberhasilan

1.9 Metode Penelitian

Menurut (Pratama, 2019). Mengatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari Penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek secara ilmiah. Penelitian deskriptif yaitu mendiskripsikan secara terperinci mengenai efektivitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berbasis Aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG).

Penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau disebut sebagai informan yang diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu metode wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen.

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif, digunakan sebagai pertimbangan permasalahan yang kompleks, dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif untuk memahami situasi sosial mendalam dengan menemukan teori melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi serta pengamatan langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang aktual mengenai bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SKIS-NG terhadap keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur karena Provinsi Lampung merupakan wilayah yang masih termasuk dalam daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan kapasitas sumber daya manusia di Lampung Timur sendiri yang di prediksi belum memadai untuk mengefektivitasikan. Serta beberapa permasalahan mulai dari data yang tidak sinkron dengan data yang ada seperti NIK, nama dan alamat para penerima bantuan. Sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran, serta kurangnya sosialisasi pada operator masing-masing desa sehingga menjadi kurang efektif.

1.9.3 Jenis Data

Dalam Penelitian ini data yang digunakan berbentuk kata maupun informasi, skema serta gambar dan tidak disertai dengan angka maupun penjumlahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yakni:

1.9.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung, informan pada Penelitian ini yakni Kepala dan Kasubag Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Operator Desa dan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

1.9.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder juga menjadi data pendukung yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu seperti website yang tersedia, jurnal, artikel, buku-buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan terkait dengan rumusan masalah.

1.9.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:57) mengatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan orang yang mengetahui dan dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, dan Kasubag pada bagian sistem informasi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, serta peneliti mengambil 3 Operator SIKS-NG desa di Kabupaten Lampung Timur yaitu Desa Raja Basabaru, Way Areng dan Srimenanti

2. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti,

Penentu informan dilakukan dengan Metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:54) teknik penentu informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang ditentukan diatas, dapat kita lihat sebuah persyaratan dalam menentukan informan, agar didapatnya informan yang tepat di dalam penelitian ini sehingga peneliti menjadi kredibel karena informan yang tepat. Pemilihan narasumber/informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci, pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Agus Subagyo, S.Sos, karena dianggap mengetahui srategi dan koordinasi dengan pihak lain yang akan digunakan dalam pengembangan pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG. Dan Kasubag Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial yaitu Bapak M Ali, S.E, dikarenakan kegiatan tentang pengembangan pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG yang ada pada bidang tersebut. serta Operator SIKS-NG Desa Raja Basabaru yaitu Ibu Wiji Kurnia, Way Areng Ibu Wiwik dan Srimenanti Ibu Endang Susilowati. Operator SIKS-NG Desa merupakan operator yang mendapat mandat dari Kementrian Sosial yang bertugas melakukan input data dan memperbaiki data kemiskinan yang ada setiap desa dan kalurahan masing-masing melalui aplikasi SIKS-NG.
2. Informan tambahan, pada penelitian ini yaitu 5 masyarakat Penerima PKH yaitu Ibu Napsiah, Ibu Suparmi, Ibu Kaspiah, Ibu Darsini, dan Ibu Marsiti.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan 3 macam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1.9.5.1 Observasi

Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana peneliti tidak ikut serta namun peneliti mengamati tempat pelayanan maupun pelayanan yang dilakukan terkait dengan aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau juga dapat membantu peneliti dalam mengetahui frekuensi pada suatu kejadian.

1.9.5.2 Wawancara

Wawancara pada penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai Bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SKIS-NG terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber yaitu Kepala dan Kasubag pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Operator Desa, serta Masyarakat.

Tabel 1. 4Wawancara

No	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Sosial	2	1. Kepala Dinas Sosial (Agus Subagyo, S.Sos) 2. Kasubag Perlindungan dan Jaminan Sosial (M Ali, S.E)
2.	Pemerintah Desa	3	1. Operator SIKS-NG Desa Raja Basabaru (Ibu Wiji Kurnia)

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Operator SIKS-NG Desa Way Areng (Ibu Wiwik) 3. Operator SIKS-NG Desa Srimenanti (Ibu Endang Susilowati)
3.	Masyarakat	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Penerima PKH (Ibu Napsiah) 2. Masyarakat Penerima PKH (Ibu Suparmi) 3. Masyarakat Penerima PKH (Ibu Kaspiah) 4. Masyarakat Penerima PKH (Ibu Darsini) 5. Masyarakat Penerima PKH (Ibu Marsiti)

1.9.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mengambil gambar atau foto serta membaca dokumen ataupun literatur yang harus saling berkaitan dengan penelitian-penelitian yang akan digunakan. Metode dokumentasi dilakukan setelah turun lapangan, peneliti mencari dokumen terkait dengan penelitian. Metode ini dapat berbentuk gambar maupun lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil dokumentasi secara pribadi berupa photo, website Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk dipahami. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis dengan mengumpulkan data non statistik dan kemudian data data yang telah terkumpul lalu dicatat dan dijadikan rangkaian kalimat-kalimat. Selanjutnya, analisa dilakukan dengan menguraikan secara logis dan terperinci sesuai dengan

informasi yang telah didapatkan. Berikut merupakan Langkah-langkah analisis data menurut (Miles & Huberman, 1992) sebagai berikut :

1.9.6.1 Pengumpulan Data

Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, merekam dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

1.9.6.2 Reduksi Data

Reduksi data pada Penelitian ini pemusatan dan penyederhanaan abstraksi serta transformasi data yang timbul dari catatan tertulis pada saat wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sehingga data yang sudah dianalisis dapat digunakan untuk memunculkan gambaran yang lebih tajam dan terperinci mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial berbasis Aplikasi SIKS-NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu diperlukanya reduksi data dalam Penelitian ini.

1.9.6.3 Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan danya penarikan kesimpulan. Dilakukan penyajian data dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan Berdasarkan pemahaman-pemahaman yang diperoleh.

1.9.6.4 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjelaskan hasil Penelitian secara singkat yang dilakukan oleh Penelitian dan berisi fakta fakta dari lapangan yang mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada Penelitian yaitu bagaimana pengelolaan data berbasis aplikasi SIKS-NG terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur?. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh memiliki validasi sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi lebih utuh.

